

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejak terjadinya krisis global pada tahun 1997 membawa Indonesia mendapat tekanan ekonomi yang cukup berat. Krisis ekonomi yang berkepanjangan telah membawa permasalahan besar bagi kehidupan bangsa Indonesia dengan berbagai dampak negatifnya. Pengaruh dari krisis globalisasi berdampak pada kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya di tanah air. Naiknya harga minyak dan pangan dunia telah berimbas pada kondisi ekonomi di negara kita. Dari sisi perekonomian, kita mengalami tekanan berupa kenaikan subsidi BBM dalam APBN, kenaikan biaya produksi di bidang industri, serta melemahnya pasar ekspor.

Di sisi lain Indonesia sedang menjalani proses reformasi. Indonesia berkembang menjadi negara demokrasi dan melakukan desentralisasi secara luas. Dengan sistem demokrasi dan desentralisasi yang begitu besar, tuntutan masyarakat muncul untuk dipuaskan secara ekonomi dan politik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan bangsa yang mandiri dan bermartabat, maka sebagaimana telah dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, pemerintah telah menetapkan misi pembangunan nasional sebagai upaya untuk memperkuat kemandirian bangsa.

Salah satu misi pembangunan nasional adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan mengedepankan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Daya saing suatu bangsa tidak bisa dipisahkan dari mutu dan kualitas SDM bangsa tersebut. Kualitas SDM yang diinginkan adalah SDM yang mampu melaksanakan pembangunan nasional secara inovatif, kreatif dan produktif dengan semangat kerja dan disiplin tinggi. Jumlah penduduk Indonesia yang sudah mencapai 226 juta jiwa merupakan potensi sumber daya manusia yang strategis bagi pelaksanaan pembangunan.

Kenyataannya, pemerintah saat ini kurang mampu dalam meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Ketidakmampuan dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia nasional, menyebabkan semakin terpuruknya posisi Indonesia dalam persaingan global. Menurut *The 2006 Global Economic Forum on Global Competitiveness Index (GCI)* yang di-release *World Economic Forum*, daya saing global Indonesia berada pada posisi yang rendah. Wilayah Asia seperti negara Taiwan dan Singapura menempati urutan ke-5 dan 6, sementara Jepang berada pada ranking ke-12. Cina dan India ranking ke-49 dan 50. Kualitas SDM Indonesia disejajarkan dengan negara Gambia yang masuk dalam kategori negara *low-income countries*

Sebelum terjadi krisis ekonomi, suasana bangsa terpaku pada industri-industri besar yang seolah-olah memberikan harapan cerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sementara industri-industri kecil nyaris hanya menjadi bagian yang kecil, bahkan keberadaannya tergusur oleh produk impor sejenis yang harganya lebih murah dan lebih baik kualitasnya. Industri-industri kecil

tidak dapat sepenuhnya didorong untuk sanggup bersaing dengan produk impor atau menjadi partner besar sebagai pemasok komponen-komponen produknya, karena keterbatasan kualitas sumberdaya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di lain pihak lulusan Perguruan Tinggi (PT) lebih banyak berorientasi untuk berkarya di industri-industri besar daripada bekerja pada perusahaan kecil dan menengah atau menjadi pengusaha mandiri, bahkan banyak para lulusan Perguruan Tinggi masih menjadi problem dan penambah beban berat angkatan kerja.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2006 menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2006 sebanyak 39,05 juta atau 17,75 persen dari total 222 juta penduduk. Penduduk miskin bertambah empat juta orang dibanding yang tercatat pada Februari 2005. Angka pengangguran berada pada kisaran 10,8% sampai dengan 11% dari tenaga kerja yang masuk kategori sebagai pengangguran terbuka. *The Indonesian Institute center for Public Research* menyebutkan bahwa pengangguran terbuka tahun 2008 mencapai 9,4 juta jiwa yang terdiri dari 4,5 juta jiwa adalah pengangguran terdidik 60% adalah sarjana. (Anton Sumantri, 2009)

Kondisi tersebut di atas didukung pula oleh kenyataan bahwa sebagian besar lulusan Perguruan Tinggi adalah lebih sebagai pencari kerja (*job seeker*) daripada pencipta lapangan pekerjaan (*job creator*). Hal ini bisa jadi disebabkan karena sistem pembelajaran yang diterapkan di berbagai perguruan tinggi saat ini lebih terfokus pada bagaimana menyiapkan para mahasiswa yang cepat lulus dan mendapatkan pekerjaan, bukannya lulusan yang siap menciptakan pekerjaan.

Fenomena pengangguran lulusan PT (Perguruan Tinggi) tidak terlepas dari kondisi-kondisi sebagai berikut :

- (1) Masalah *link and match* antar lulusan perguruan tinggi dengan dunia kerja:
 - a. Lulusan PT masih dianggap kurang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
 - b. Lulusan PT masih sebagai pencari kerja ketimbang membuka lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.
- (2) Orientasi Kurikulum:
 - a. Pencapaian IPK
 - b. Penyelesaian masa studi
 - c. Bidang keterampilan (*life skill*) atau kewirausahaan belum banyak dikembangkan.
 - d. Ada kecenderungan mahasiswa dalam kegiatan ekstra kampusnya lebih terfokus kepada hal-hal bidang politik ketimbang bidang kewirausahaan; padahal setelah mahasiswa lulus yang dihadapi mereka pada umumnya adalah dunia kerja yang ketika mereka di kampus kurang mendapat perhatian. (Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan UPI, 2009; 4)

Jumlah pengangguran terutama pengangguran terbuka menurut pendidikan tampak dalam Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tahun 2006 s.d Tahun 2008

Pendidikan	2006	2007	2008
< SD	2.163.426	3.419.614	2.744.943
SMP	1.416.646	2.643.062	2.166.619
SMTA	3.991.502	3.745.035	3.369.959
Diploma/Akademi	322.836	330.316	519.867
Universitas	385.418	409.890	626.207
Jumlah	10.854.254	10.547.890	9.427.590

Sumber: Depnakertrans (2009)

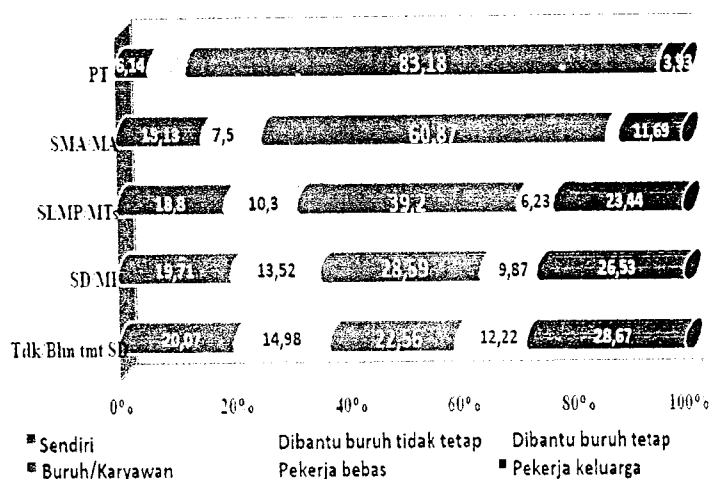
Tabel 1.1, menunjukkan bahwa jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir terus meningkat secara signifikan.

Salah satu faktor penyebab meningkatnya jumlah pengangguran lulusan Perguruan Tinggi di Indonesia, karena daya serap industri sebagai *end user* hanya mencapai 10% sampai 15% sehingga hampir setiap tahun terjadi peningkatan

jumlah angkatan kerja yang belum terserap oleh lingkungan industri. Akibatnya sekarang pengangguran intelektual terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan hasil survei angkatan kerja nasional atau sakernas 2009, mayoritas lulusan perguruan tinggi (74%) menjadi pegawai, karyawan atau buruh. Hasil ini menunjukkan lulusan terdidik, terutama lulusan perguruan tinggi rela menganggur hanya untuk menunggu kesempatan menjadi pegawai atau karyawan apapun, tidak mau mencoba terjun ke dunia usaha (Ciputra, 21 Januari 2010)

Demikian pula dalam kemandirian dan semangat kewirausahaan menurut tingkat pendidikan, semakin tinggi pendidikan seseorang di Indonesia, justru semakin rendah kemandirian dan jiwa kewirausahannya Gambar 1.1 berikut memperlihatkan kemandirian wirausaha menurut tingkat pendidikan:



GAMBAR 1.1
Kemandirian Wirausaha Menurut Tingkat Pendidikan
Sumber : Kopertis Jabar (Diunduh dari www.kopertis5.org/)

Tampak dalam Gambar 1.1, lulusan Perguruan Tinggi sekitar 83,18% lebih memilih sebagai karyawan atau buruh dibandingkan menjadi wirausaha yang hanya 6,14%. Sekitar 6,75% memilih buruh tidak tetap, dan tetap, serta 3,93% menjadi pekerja keluarga. Tingginya angka lulusan Perguruan Tinggi yang bekerja sebagai buruh atau karyawan menunjukkan rendahnya tingkat kemandirian dan semangat kewirausahaan sekaligus mengindikasikan rendahnya perilaku kewirausahaan.

Rendahnya perilaku kewirausahaan dapat dilihat juga dari angka pengangguran yang setiap tahunnya terus meningkat, khususnya para lulusan yang berlatar belakang pendidikan di perguruan tinggi (sarjana). Di Kota Bandung angka pengangguran termasuk tinggi. Akumulasi angka pengangguran di Kota Bandung selama kurun waktu dua tahun terakhir ini sudah mencapai di atas 100.000 orang per tahun. Departemen Tenaga Kerja Kota Bandung mencatat jumlah angkatan kerja pada tahun 2007 mencapai 1.091.345 orang (yang masuk kerja 932.238 orang dan sisanya 174.067 orang adalah pengangguran kumulatif). Pada tahun 2008, angkatan kerja di Kota Bandung ini naik menjadi 1.117.700 orang. Rata-rata jumlah pencari kerja mencapai 30 ribu orang dan sebanyak 40% didominasi oleh pencari kerja dengan latar belakang pendidikan sarjana. (Sumber: BPS Jabar 2009)

Khusus lulusan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sejalan dengan pengembangan UPI sebagai perguruan tinggi BHMN telah mampu mendorong peningkatan jumlah lulusan. Tahun 2007 UPI meluluskan sebanyak 6.955 orang. Tahun 2008 sebanyak 5459 orang, meningkat menjadi 6514 orang pada tahun

2009. Namun bagaimana lulusan UPI terserap dunia kerja ? Hal ini memerlukan pengkajian yang cukup serius dan mendalam. Sebab diduga masa tunggu lulusan UPI setiap tahunnya terus bertambah seiring dengan adanya kebijakan pemerintah yang *zero growth* untuk pengangkatan pegawai negeri sipil. (Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan UPI, 2010: 2). Hal tersebut akan menambah jumlah pengangguran terdidik setiap tahunnya. Dengan semakin bertambahnya pengangguran akan berdampak negatif terhadap stabilitas sosial dan kemasyarakatan.

Fakry Gaffar dalam pidatonya pada upacara wisuda 1 UPI. 17 April 2002 (2002: 3-5), mengemukakan bahwa:

Produksi tenaga kependidikan amat bagus, namun gap antara *demand* dan *supply* masih terbentang lebar. Kondisi kesempatan kerja sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 hingga saat ini belum membaik dan masih berputar-putar pada tempat dan kondisi yang belum menunjukkan adanya *economic recovery* yang berarti. Untuk menghadapi kondisi tersebut, para lulusan harus dapat memanfaatkan kemampuannya untuk menemukan pekerjaan apa saja yang halal dan legal yang dapat memberikan kehidupan yang layak.

Selanjutnya dikemukakan bahwa kemampuan membangun, kemampuan untuk menciptakan kerja sendiri dan kemampuan berwirausaha merupakan *life skill* atau keterampilan hidup yang perlu ditumbuhkan dalam diri masing-masing lulusan.

Sejak tahun 1998, UPI mengembangkan kurikulum yang bersifat *wider mandate*, yaitu membuka program-program non-kependidikan di banyak jurusan dan Program D3 Teknologi (Poltek). Tahun 2004, UPI telah berubah status kelembagaan menjadi PT BHMN, sehingga UPI telah memperluas orientasi dari yang awalnya sebagai lembaga yang khusus membentuk calon guru dan tenaga

kependidikan lainnya, sekarang ditambah mendidik calon tenaga profesional non kependidikan.

Sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, UPI memiliki misi sebagai berikut: (Kurikulum, 2009: 4)

- a. Menyelenggarakan pendidikan untuk menyiapkan tenaga kependidikan guru dan nonguru serta tenaga non-kependidikan yang profesional dan berdaya saing global
- b. Mengembangkan teori-teori pendidikan dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan pendidikan nasional.
- c. Menyelenggarakan pelayanan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah nasional dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi, sosial dan budaya
- d. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional dan internasional

UPI memiliki tujuan sebagai berikut: (Kurikulum, 2009:5-6)

- a. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi ilmuwan, tenaga kependidikan dan tenaga non-kependidikan yang beriman, bertakwa, profesional, berkompentensi tinggi dan berwawasan kebangsaan;
- b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi. Olahraga dan seni;
- c. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri;
- d. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu dan bermartabat.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut tidaklah mudah, karena banyak faktor atau kendala yang harus dihadapi seperti telah dikemukakan, antara lain terbatasnya kesempatan kerja, baik sebagai pegawai negeri sipil (guru, dosen atau tenaga kependidikan lainnya), sebagai pegawai/karyawan swasta maupun BUMN, apalagi setelah terjadinya krisis ekonomi global, banyak perusahaan atau

lembaga yang merumahkan para pegawainya bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berakibat semakin tingginya angka pengangguran.

Pengamatan awal terhadap 30 orang lulusan mahasiswa UPI, menunjukkan bahwa sikap mereka terhadap kewirausahaan cenderung rendah. Hal tersebut tampak pada Tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Hasil Pra penelitian Tentang Sikap Lulusan UPI Terhadap Kewirausahaan

Kategori	F	%
Sangat Positif	2	6,67
Positif	6	20
Cukup	5	16,67
Negatif	13	43,33
Sangat Negatif	4	13,33
	30	100

Sumber: Pra Penelitian 2009

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, tampak bahwa sebagian besar lulusan (73,37%) memiliki sikap kewirausahaan yang cenderung rendah atau negatif. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan kurang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan maupun perkembangan IPTEK, sulit untuk dilatih kembali, kurang bisa mengembangkan diri dan tidak memiliki sikap wirausaha. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Buchari Alma (2009: 5) menyatakan bahwa:

Rendahnya sikap wirausaha para lulusan disebabkan beberapa faktor penghambat, antara lain faktor dari para lulusan itu sendiri, faktor lingkungan dan faktor sekolah. Kekurangmampuan dalam bersaing, rendahnya kompetensi serta keinginan untuk usaha mandiri yang belum atau masih rendah merupakan faktor penghambat dari para lulusan, mengharapakan anaknya menjadi pegawai negeri, atau mencari kerja, pandangan bahwa dunia dagang adalah pekerjaan yang hina merupakan faktor penghambat dari lingkungan, keluarga, orang tua; kompetensi guru yang rendah, kondisi sekolah yang tidak kondusif, merupakan faktor penghambat dari sekolah

Sikap kewirausahaan yang relatif negatif atau rendah menunjukkan rendahnya perilaku kewirausahaan mahasiswa. Winardi (2007:211) menjelaskan

bahwa sikap adalah determinan perilaku. Dengan demikian tampak jelas bahwa rendahnya perilaku kewirausahaan dipengaruhi oleh sikap kewirausahaan.

Selain sikap, motivasi berwirausaha mahasiswa relatif masih rendah.

Berdasarkan pra penelitian pada 30 orang mahasiswa UPI tentang motivasi kewirausahaan pada saat ini maupun setelah lulus, tampak pada Tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Hasil Pra Penelitian Tentang Motivasi Kewirausahaan Mahasiswa UPI

Kategori	F	%
Sangat Tinggi	3	10
Tinggi	5	16,67
Sedang	5	16,67
Rendah	15	50
Sangat Rendah	2	6,66
	30	100

Sumber: Pra Penelitian 2009

Tabel 1.3 di atas, menunjukkan bahwa lebih dari setengahnya (56,66%) mahasiswa memiliki motivasi kewirausahaan yang relatif rendah. Kondisi tersebut di atas didukung pula oleh kenyataan bahwa sebagian besar lulusan Perguruan Tinggi adalah lebih terdorong untuk mencari pekerjaan (sebagai pencari kerja (*job seeker*) daripada pencipta lapangan pekerjaan (*job creator*). Buchari Alma (2009:2-3) menyebutkan bahwa banyak faktor psikologis yang membentuk sikap negatif masyarakat, sehingga mereka kurang berminat terhadap profesi wirausaha, antara lain sifat agresif, ekspansif, egois, tidak jujur, kikir, sumber penghasilan tidak stabil, kurang terhormat pekerjaan rendah, sehingga mereka tidak tertarik. Para orang tua mengarahkan anaknya untuk menjadi pegawai negeri. Landasan filosofis inilah yang menyebabkan rakyat Indonesia tidak termotivasi terjun ke dunia bisnis.

Rendahnya perilaku kewirausahaan disebabkan pula oleh kurangnya kesungguhan dari pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menciptakan wirausaha dari kalangan terdidik. Hal ini terlihat dari tidak adanya dorongan agar berwirausaha dan tidak adanya dukungan permodalan serta peluang pasar bagi wirausaha baru.

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa sikap, motivasi dan perilaku kewirausahaan mahasiswa berada pada kategori rendah dalam menghadapi dunia bisnis. Padahal dengan sikap yang positif, motivasi yang tinggi dan perilaku kewirausahaan yang tinggi, diharapkan para mahasiswa menjadi agen perubahan dalam mengatasi pengangguran. Buchari Alma (2009:1) mengemukakan bahwa wirausaha merupakan potensi pembangunan, baik dalam jumlah maupun dalam mutu wirausaha itu sendiri. Hal senada dikemukakan Mas'ud Machfoedz (2004:1) bahwa wirausaha adalah pembawa perubahan dalam dunia bisnis yang tidak mudah menyerah dalam berbagai kesulitan untuk mengejar keberhasilan usaha yang dirintis secara terencana. Seorang wirausahawan adalah pribadi yang mandiri dalam mengejar prestasi, berani mengambil risiko. Demikian pula dengan pendapat Schumpetter (1950:2): *Entrepreneur as person who destroys the existing economic order by introducing new product and services, by creating new form of organization, or exploiting new raw material.*

Salah satu upaya untuk meningkatkan perilaku kewirausahaan atau membentuk wirausaha di kalangan mahasiswa khususnya dan sekaligus dapat mengurangi pengangguran terdidik adalah melalui pendidikan kewirausahaan. Pentingnya pendidikan kewirausahaan dikemukakan oleh beberapa ahli. Anastasia

Dwifebri Martanti (2008:6) mengemukakan bahwa Pemerintah yang mengandalkan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang digagas mencapai 6%, tidak akan mampu mengatasi pengangguran dan malah akan semakin meningkatkan kesenjangan (disparitas) yang cukup lebar antara golongan kaya dan miskin. Karena itu, perlu ada satu kesadaran kolektif dalam upaya mengatasi problem ketenagakerjaan, terutama para sarjana sebagai tenaga kerja terdidik. Ciputra (Pikiran Rakyat, edisi 2 Maret 2009), mengusulkan perlunya kerjasama gerakan nasional budaya wirausaha antara pihak pemerintah, akademisi, kalangan bisnis dan tokoh sosial agar budaya *entrepreneurship* bisa terbangun di Indonesia.

Pemerintah perlu mengadakan penataan kembali terhadap sistem pendidikan, mengingat anak-anak bangsa yang terdidik merupakan *asset* yang paling berharga untuk menghasilkan *human capital* yang berdaya saing serta mampu mengubah Indonesia dari *developing country* menjadi *developed country*. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 mengenai Pendidikan Nasional yang secara utuh menyebutkan bahwa :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pembangunan pendidikan hendaknya dapat membangun manusia Indonesia seutuhnya sebagai subyek yang bermutu. Membangun manusia seutuhnya berarti mengembangkan seluruh potensi manusia melalui

keseimbangan olah hati, olah pikir, olah rasa, olah raga, dan olah jiwa yang dilakukan seiring dengan pembangunan peradaban bangsa. Inovasi harus menjadi prioritas penting dalam pengembangan sektor pendidikan, jika ingin menghasilkan berbagai unggulan kompetitif *outcome* pendidikan. Tanpa ada inovasi yang signifikan, pendidikan hanya akan menghasilkan lulusan yang tidak mandiri, selalu tergantung pada pihak lain

Problem ini hendaknya menjadi perhatian semua pihak, baik Perguruan Tinggi maupun alumnus, serta semua pihak yang memiliki kepentingan bagi masa depan anak bangsa dalam rangka ikut mengatasi angka pengangguran terutama pengangguran terdidik. (Zamhuri, 2007).

Untuk menghadapi masalah pengangguran tersebut, Astim Riyanto (2000:145) menjelaskan bahwa:

...Untuk menciptakan lapangan kerja diperlukan latihan mengenal dan menguasai kesempatan. Melalui program pendidikan dan pelatihan membiasakan cara berpikir dan bersikap mental maju. Kegiatan pendidikan dan pelatihan cenderung dapat menghasilkan manusia lebih mempunyai jiwa wirausaha

Sudradjat (1999:11) mengungkapkan tiga upaya yang dapat ditempuh yaitu:

- (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia ini dapat dilakukan dengan jalan pendidikan dan pelatihan kerja profesional
- (2) Menciptakan lapangan kerja baru, penciptaan lapangan kerja baru ini sebenarnya telah banyak dilakukan oleh pemerintah, namun jumlah upaya penciptaan lapangan kerja masih relative kecil jika dibandingkan dengan jumlah pengangguran yang ada,
- (3) Menumbuhkembangkan kewirausahaan.

Dari ketiga upaya di atas, menumbuhkembangkan kewirausahaan merupakan salah satu alternatif yang menjadi tugas utama pendidikan formal. Menumbuhkembangkan kewirausahaan berarti menanamkan nilai-nilai kewirausahaan pada siswa melalui proses belajar mengajar, sehingga akan tumbuh jiwa kewirausahaan. Anastasia D. Martanti (2008: 5) mengemukakan bahwa:

Salah satu terobosan yang perlu dilakukan untuk mengatasi pengangguran di negeri ini adalah dengan membuka lapangan kerja baru, melatih tenaga-tenaga muda untuk menjadi *entrepreneur* dalam setiap jenjang pendidikan terutama pendidikan menengah atas (setingkat SMA) dan Perguruan Tinggi adalah hal yang mutlak dilakukan. Menanamkan jiwa atau sikap kewirausahaan harus dilakukan sejak dini, tanpa mempertentangkan apakah kemampuan berwirausaha itu berkat bakat (terlahir) atau hasil pendidikan (terdidik). Selain itu, pendidikan dapat menjadi pendorong kesuksesan berwirausaha.

Namun pendidikan kewirausahaan di Indonesia masih kurang memperoleh perhatian yang cukup memadai, baik oleh dunia pendidikan maupun masyarakat. Banyak pendidik yang kurang memperhatikan penumbuhan sikap, motivasi dan perilaku kewirausahaan sasaran didik, baik di SMK/SMA sampai Perguruan Tinggi. Orientasi mereka, pada umumnya hanya pada menyiapkan tenaga kerja. Sebagian besar anggota masyarakat mengharapkan output pendidikan sebagai pekerja, sebab dalam pandangan mereka bahwa pekerja (terutama pegawai negeri) adalah priyayi yang memiliki status sosial cukup tinggi dan disegani oleh warga masyarakat. Lengkaplah sudah, baik pendidik, institusi pendidikan, maupun masyarakat, memiliki persepsi yang sama terhadap harapan output pendidikan (Buchari Alma:2009: 2).

Ciputra (Pikiran Rakyat, edisi 2 Maret 2009), mengemukakan bahwa orientasi pendidikan di Indonesia saat ini umumnya hanya menciptakan manusia

pencari kerja dan bukan membuat manusia pencipta lapangan kerja. Oleh sebab itu, generasi muda kita umumnya tidak memiliki kecakapan untuk menciptakan pekerjaan bagi dirinya sendiri. Padahal peluang usaha untuk menjadi wirausaha masih terbuka lebar untuk diisi oleh masyarakat. Menurut Ciputra dengan mengutip ahli sosiologi McClelland, suatu negara bisa menjadi makmur bila memiliki sedikitnya 2% *entrepreneur* dari total jumlah penduduknya.

Dari data statistik, saat ini Indonesia baru memiliki sekitar 400.000 *entrepreneur* atau hanya sekitar 0,18% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah kurang lebih 220 juta jiwa. (Anastasia Dwifabri Martanti, 2008)

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, tampak bahwa masalah pengangguran di Indonesia bukan hanya karena terbatasnya lapangan kerja dibandingkan dengan pencari kerja, namun disebabkan juga oleh terbatasnya jumlah wirausaha jika dibandingkan dengan jumlah penduduk. Dengan demikian jelaslah bahwa masalah pendidikan kewirausahaan harus menjadi perhatian semua pihak karena konsekuensi logis dari sikap dan motivasi berwirausaha cenderung berdampak pada rendahnya perilaku kewirausahaan yang pada gilirannya akan meningkatkan jumlah pengangguran terdidik.

The Indonesian Institute Center for Public Research menyebutkan bahwa pengangguran meningkat karena belum berjalannya konsep *link and match* antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Dunia pendidikan kita masih berbasis *product oriented*, lebih focus menghasilkan lulusan berkualitas dari sisi akademis. Semestinya basis pendidikan kita lebih pada *labour market based*.

Betapa pentingnya pendidikan terhadap perubahan sikap, motivasi dan perilaku peserta didik. Muhibinsyah (2006: 10) mengemukakan bahwa pendidikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan.

Mudyahardjo (2001: 6) mengemukakan bahwa pendidikan ialah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Nursid Sumaatmadja (2002:41) menyatakan bahwa pendidikan sebagai proses perubahan perilaku secara alamiah berjalan spontan.

Oleh karena itu proses pendidikan yang ditempuh oleh pelaksana pendidikan sangat terbuka mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah. Jarvis (1990) dalam Mustofa Kamil (2010:4), mendefinisikan pendidikan sebagai proses belajar mengajar yang terorganisir dan terus menerus yang dirancang untuk mengkomunikasikan perpaduan pengetahuan, skill dan pemahaman yang bernilai untuk seluruh aktivitas hidup. Syaiful Sagala (2007:4) mengemukakan bahwa pendidikan ialah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah melalui bimbingan, pengajaran dan atau latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah.

Pendidikan luar sekolah dapat dilakukan melalui magang. Dengan magang, pemegang (peserta didik) akan memperoleh pengalaman kerja. Pembelajaran yang hanya mengandalkan pemberian perkuliahan kepada para mahasiswa di ruang kelas tanpa memberikan kesempatan pembelajaran di dunia nyata, meninggalkan mahasiswa tanpa pembelajaran atau pemahaman terhadap

pelajaran yang total (Meredith, 2005). Tataran era masyarakat ekonomi baru yang berbasis pengetahuan memunculkan paradigma baru yang memunculkan DUDI (dunia usaha dan industri)/UKM menjadi tempat pembelajaran yang syah dan penghasil pengetahuan baru yang relevan yang mungkin meruntuhkan posisi monopoli pendidikan tinggi sebagai satu-satunya pusat pembelajaran dan sumber penghasil pengetahuan.

Karena pentingnya aspek sumber daya manusia dalam pembangunan, maka membentuk jiwa kewirausahaan menjadi sangat penting. Demikian pentingnya aspek tersebut sampai memunculkan konsep pendidikan kewirausahaan. Konsep pendidikan kewirausahaan yang bertujuan untuk membentuk sikap mental kewirausahaan yang tangguh perlu dipikirkan secara serius. Model pendidikan kewirausahaan yang ideal yang dapat melahirkan wirausahawan-wirausahawan baru yang handal perlu diteliti dan dikembangkan. Berdasarkan alasan tersebut kewirausahaan sekarang ini menjelma menjadi suatu disiplin ilmu. Soeharto Prawirokusumo (1997:4), mengemukakan dewasa ini pendidikan kewirausahaan telah diakui sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri yang independen (*an independent academic disciplined*) karena:

- a. Kewirausahaan merupakan *body of knowledge* yang utuh dan nyata (*distinctive*) yang mencakup teori, konsep dan metode ilmiah yang lengkap.
- b. Kewirausahaan memiliki dua konsep, yaitu posisi *venture start up* dan *venture-growth*. Hal ini jelas tidak termasuk dalam kerangka manajemen umum (*frame work general management courses*) yang memisahkan antara manajemen dan kepemilikan usaha (*business ownership*)
- c. Kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki obyek tersendiri, yaitu kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*ability to create new and different*)

- d. Kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan berusaha dan pemerataan pendapatan (*wealth creation process an entrepreneurial endeavor by its own right, nations prosperity, individual self reliance*) atau kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur.

Perkembangan ilmu kewirausahaan sangat pesat. Pada awalnya ilmu kewirausahaan berkembang dalam bidang perdagangan, namun dengan pesat mengalami evolusi ke berbagai bidang lain, seperti industri, pendidikan, kesehatan serta pada berbagai institusi lain seperti lembaga pemerintah, perguruan tinggi dalam menciptakan perubahan, pembaharuan dan kemajuan.

Selaras dengan kebijakan Depdiknas tentang relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan, maka proses pendidikan di Perguruan Tinggi harus memperhatikan lingkungan dan kebutuhan dunia kerja khususnya dunia usaha dan atau dunia industri. Dunia kerja pada saat ini dan masa mendatang secara selektif akan menjaring calon tenaga kerja yang benar-benar profesional pada bidangnya, karena dengan persaingan global akan makin terbuka lebar kesempatan bagi tenaga kerja asing untuk masuk/menguasai dunia kerja di Indonesia. Oleh karena itu salah satu tantangan utama bagi lulusan perguruan tinggi adalah mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum memasuki dunia kerja.

Untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan dan meningkatkan aktivitas kewirausahaan agar para lulusan perguruan tinggi lebih menjadi pencipta lapangan kerja dari pada pencari kerja, maka diperlukan suatu usaha nyata. Departemen Pendidikan Nasional telah mengembangkan berbagai kebijakan dan program untuk mendukung terciptanya lulusan perguruan tinggi yang lebih siap bekerja dan menciptakan pekerjaan. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan

Cooperative Education (Co-op) telah banyak menghasilkan alumni yang terbukti lebih kompetitif di dunia kerja, dan hasil-hasil karya inovasi mahasiswa melalui PKM potensial untuk ditindaklanjuti secara komersial menjadi sebuah embrio bisnis berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni. Kebijakan dan program penguatan kelembagaan yang mendorong peningkatan aktivitas berwirausaha dan percepatan pertumbuhan wirausaha-wirausaha baru dengan basis IPTEK.S sangat diperlukan.

Dengan latar belakang tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengembangkan sebuah Program Mahasiswa Wirausaha (*Entrepreneur Student Program*) yang merupakan kelanjutan dari program-program sebelumnya (PKM, Co-op, KKU) untuk menjembatani para mahasiswa memasuki dunia bisnis rill melalui fasilitasi *start-up business*. Program Mahasiswa Wirausaha (PMW), sebagai bagian dari strategi pendidikan di Perguruan Tinggi, dimaksudkan untuk memfasilitasi para mahasiswa yang mempunyai minat dan bakat kewirausahaan untuk memulai berwirausaha dengan basis ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang sedang dipelajarinya. Fasilitas yang diberikan meliputi pendidikan dan pelatihan kewirausahaan magang, penyusunan rencana bisnis, dukungan permodalan dan pendampingan usaha. Program PMW diharapkan mampu mendukung visi-misi pemerintah dalam mewujudkan kemandirian bangsa melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan UKM.

Telah banyak upaya yang dilakukan oleh UPI untuk mengatasi masalah pengangguran, seperti diamanatkan Depdiknas, diantaranya dengan mengadakan kerjasama dengan pelaku ekonomi khususnya UMKM, melalui pelatihan-

pelatihan, Kuliah Kerja Usaha, magang. UPI misalnya, sejak tahun 2003 telah melaksanakan *pilot project Co-op* di UKM serta Pengembangan Forum Komunikasi dan Konsultasi bersama Pemda dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas melalui Direktorat Pembinaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Peran Masyarakat (DPKPPM).

Hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut memberikan *feed back* yang sangat positif terutama dalam menumbuhkan dan mengembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa, memberikan pengalaman nyata di dunia kerja, membuka kesempatan kerja dan memperkuat kemitraan Perguruan Tinggi dengan pelaku usaha/UMKM. Namun program-program pembinaan kewirausahaan yang selama ini diselenggarakan Perguruan Tinggi masih terbatas, baik dari segi jumlah mahasiswa yang terlibat maupun hasil akhir untuk menjadikan mahasiswa sebagai pelaku wirausaha. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan tersebut di atas, tampaknya masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, UPI melalui Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan mengadakan Program Mahasiswa Wirausaha. Program wirausaha mahasiswa dapat meningkatkan program kewirausahaan yang selama ini sedang dikembangkan dan mendorong menuntaskan untuk lahirnya wirausaha baru dari kalangan mahasiswa. Program Mahasiswa Wirausaha adalah program yang berfokus pada pembinaan potensi kewirausahaan mahasiswa dengan target akhir lahirnya wirausaha baru di kalangan mahasiswa. Program Mahasiswa Wirausaha dilakukan dengan melihat potensi dan tantangan

menciptakan wirausaha baru di kalangan mahasiswa. Potensi dan tantangan dimaksud, tampak pada Tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4
Potensi dan Tantangan Menciptakan Wirausaha Baru di kalangan Mahasiswa

Potensi	Tantangan
-mahasiswa memiliki kemampuan intelektual tinggi (<i>hard skill</i>) -idealis, kreatif, inovatif -Cepat berkembang -apabila dibina akan memiliki soft skill yang tinggi -banyak UKM sukses dan cepat berkembang, karena pimpinannya berpendidikan PT	-Kurikulum PT kurang "berbau" kewirausahaan -Iklim kampus "menjauh" terhadap bidang kewirausahaan -miskin pengalaman bidang usaha

Sumber: Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan. UPI, (2009:4)

Secara rinci tujuan yang ingin dicapai dari Program Mahasiswa Wirausaha di UPI adalah sebagai berikut: (1) Menumbuhkembangkan iklim dan budaya kewirausahaan di dalam lingkungan UPI, (2) Membelajarkan mahasiswa UPI dengan pola belajar bekerja dan pertukaran belajar (*Exchange Learning*) dengan dunia usaha di UKM, sehingga mahasiswa dapat memahami dan menghayati liku-liku dan seluk beluk praktek usaha serta dapat berkontribusi memecahkan masalah dan mendorong usaha tempat mahasiswa bekerja, (3) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bekerja sama dengan UKM di dalam merintis dan mengembangkan usaha yang dimininati atau pengembangan usaha sejenis dari UKM mitra, (4) Menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan dan meningkatkan aktivitas kewirausahaan mahasiswa UPI, (5) Terciptanya Unit Bisnis baru berbasis IPTEKS yang dikelola oleh mahasiswa baik perorangan maupun kelompok, (6) Mendorong terciptanya lulusan UPI yang mandiri dan menjadi wirausahawan baru yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan menjadi

mitra baru UPI sebagai pelaku UKM dalam menyelenggarakan pendidikan kewirausahaan mahasiswa UPI, (7) tercipta jejaring antara unit bisnis baru yang dikelola mahasiswa dengan UKM sebagai tempat magang mahasiswa dengan prinsip saling mengembangkan berbasis kemitraan, (8) Memberikan *feedback* bagi UPI dalam meningkatkan kualitas dan relevansi pengembangan kurikulumnya agar sesuai dengan tuntutan dunia kerja, dan (9) Memperkuat hubungan kemitraan UPI dengan UKM yang selama ini telah terjalin.

Adapun target dari program kewirausahaan mahasiswa adalah (1) Terciptanya wirausaha baru di kalangan mahasiswa UPI, (2) Terwujudnya model pendidikan kewirausahaan bagi mahasiswa yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik UPI, (3) Tumbuh dan berkembangnya lembaga kewirausahaan mahasiswa di lingkungan UPI. Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari program ini meliputi manfaat bagi mahasiswa, UKM dan bagi UPI dengan rincian sebagai berikut: *Pertama*, manfaat bagi mahasiswa: (a) memberikan pengalaman bekerja secara nyata di UKM, sehingga dapat meningkatkan *soft skill* dan *hard skill*-nya, (b) terlibat secara langsung dalam praktek dunia UKM, sehingga tumbuh jiwa *entrepreneurship*-nya dan mendorong keberaniannya untuk mencoba suatu bidang usaha baik secara perorangan maupun kelompok. (c) melihat dan merasakan secara nyata relevansi antara teori-teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan dunia UKM. (d) memperoleh penghasilan, membuka peluang untuk mendapatkan pekerjaan di tempat magang atau di tempat lain serta memperoleh kesempatan untuk mencoba usaha atas dukungan modal dan pendampingan dari UPI. *Kedua*, manfaat bagi UKM: (a) dapat mengisi kebutuhan tenaga kerja jangka

pendek yang kompeten dan "terampil". (b) dapat memilih atau menyeleksi tenaga kerja secara lebih efisien untuk mengisi kebutuhan SDM jangka pendek dan jangka panjang. (c) memperbaiki dan mengembangkan aspek-aspek pengelolaan usaha, seperti membenahan manajemen usaha, akuntansi keuangan, pengembangan jaringan pemasaran serta aspek lainnya. (d) meningkatkan akses terhadap informasi, teknologi dan permodalan dan (e) meningkatkan kredibilitas terhadap konsumen, karena bermitra dengan perguruan tinggi. ketiga. Manfaat bagi UPI: (a) dapat menyesuaikan dan mempertajam relevansi kurikulum dan pembelajarannya dengan perkembangan lapangan pekerjaan, (b) menguatkan program pendidikan kewirausahaan mahasiswa di lingkungan UPI, (c) mendorong kemampuan para dosen dalam pematakhiran metodologi perkuliahan yang relevan dengan lapangan pekerjaan, (d) mengembangkan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dengan khalayak sasaran pelaksana UKM dan (e) membuka dan meningkatkan program kemitraan dengan UKM. (Panduan PMW UPI, 2010:5-6)

Program Mahasiswa Wirausaha, dilakukan dengan cara memberikan pendidikan dan latihan (diklat) kewirausahaan, magang, pemberian modal bergulir, dan pelaksanaan usaha kepada mahasiswa.

Pendidikan kewirausahaan berhubungan dengan menambah pengetahuan umum tentang kewirausahaan dan biasanya lebih banyak berhubungan dengan teori, sedangkan latihan kewirausahaan merupakan proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan wirausaha dalam waktu yang relatif singkat dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek daripada teori. Pendidikan dan latihan (Diklat) adalah: upaya untuk menanamkan pengertian,

kesadaran, sikap, dan perilaku secara mandiri dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan untuk diri sendiri maupun orang lain.(Salim Siagaan, 1995:8). Diklat adalah proses peningkatan keterampilan kerja baik teknis maupun non teknis maupun manajerial (Malayu Hasibuan ,2003:70),

Magang merupakan suatu proses pembelajaran yang mengandung unsur belajar sambil bekerja. Warga belajar sebagai pemegang akan membiasakan diri mengikuti proses pekerjaan yang dilakukan oleh permegang. Magang merupakan proses belajar dimana seseorang memperoleh dan menguasai keterampilan dengan jalan melibatkan diri dalam proses pekerjaan tanpa atau dengan petunjuk orang yang sudah terampil dalam pekerjaan itu. Dalam hal ini UPI mengadakan kerjasama dengan UMKM untuk dijadikan tempat magang mahasiswa. Magang dilakukan setelah mahasiswa memperoleh diklat kewirausahaan.

Dalam kegiatannya pembelajaran kewirausahaan melibatkan sekurang-kurangnya 3 komponen, yaitu siswa, guru dan lingkungan (Disman, 2004:4). Karakteristik individu meliputi berbagai variabel seperti motif, nilai-nilai, sifat kepribadian dan sikap yang saling berinteraksi satu sama lain dan kemudian berinteraksi dengan faktor-faktor lingkungan dalam menentukan perilaku. Faktor lingkungan memiliki kekuatan besar dalam menentukan perilaku, bahkan kadang-kadang kekuatannya lebih besar daripada karakteristik individu. Hal inilah yang menjadikan prediksi perilaku lebih kompleks. (Saifuddin Azwar, 2008:11).

Beberapa kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kewirausahaan, belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga hasilnya belum mampu menghasilkan wirausahawan baru. Demikian pula dengan hasil-hasil penelitian di

atas menunjukkan masih rendahnya sikap, motivasi dan perilaku kewirausahaan. Hal ini sangat menarik dan merupakan tantangan bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut, terutama dari aspek psikologi, khususnya teori perilaku, sikap dan motivasi dengan objek penelitian perilaku mahasiswa sebagai peserta Program Kewirausahaan Mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia,

Grand Theory yang dijadikan dasar kajian dalam penelitian ini adalah Teori perilaku oleh Kurt Lewin dalam Saifuddin Azwar (2008:10), diformulasikan dengan rumus $B = f(P, E)$, artinya perilaku (B) adalah hasil interaksi antara (P) *person* dengan (E) *environment*. Konsep dasar tersebut mengungkapkan bahwa perilaku individu pada dasarnya dilandasi oleh proses-proses psikis pada diri individu atau organisme di dalam lingkungan tertentu.

Karakteristik individu meliputi berbagai variabel seperti motif, nilai-nilai, sifat kepribadian dan sikap yang saling berinteraksi satu sama lain dan kemudian berinteraksi dengan faktor-faktor lingkungan dalam menentukan perilaku (Saifuddin Azwar, 2008:11).

Winardi (2007: 197) mengemukakan tiga variabel yang mempengaruhi perilaku individu, yaitu variabel individual meliputi kemampuan-kemampuan, keterampilan-keterampilan, mental, latar belakang keluarga, kelas sosial, pengalaman-pengalaman dan demografik. Kemampuan, keterampilan dan mental yang dimiliki oleh seseorang dapat dibentuk melalui pendidikan/pembelajaran, baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun lembaga sekolah. Variabel psikologikal, meliputi persepsi, sikap, motivasi. Variabel keorganisasian, meliputi sumber-sumber daya, kepemimpinan, imbalan-imbalan, struktur dan desain

pekerjaan. Lebih lanjut, Winardi (2007:211) menjelaskan bahwa sikap adalah determinan perilaku, karena mereka berkaitan dengan persepsi dan motivasi. Motivasi adalah dorongan untuk bertindak. Sumantri (2001:53) mengungkapkan bahwa motivasi sangat penting untuk mengerti mengenai mengapa dan bagaimana perilaku seseorang dalam bekerja atau dalam melakukan suatu tugas tertentu. Perilaku adalah pola tingkah laku yang tampak pada seseorang saat melakukan tugas tertentu. Sikap dan motivasi seharusnya konsisten dengan perilaku seseorang.

Bandura (1977: 11-12), menjelaskan bahwa “perilaku individu merupakan hasil interaksi yang kontinu dan timbal balik dari determinan-determinan pribadi dan lingkungan”. Konsep ini menekankan pentingnya interpretasi individu dalam mengatur perilakunya. Asumsi dasar teori *social learning* mengungkapkan bahwa perilaku individu kecuali instink adalah hasil belajar, yakni perubahan perilaku individu akibat adanya pengaruh lingkungan. *Middle Theory* yang digunakan adalah Teori Konsistensi Afektif-Kognitif Roserberg (Fishbein dan Ajzen 1975), dan Teori Motivasi berprestasi dari McClelland (1965). Sedangkan *grounded theory* adalah Teori Belajar Humanistik dari Carl Rogers (1976).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: Sejauh manakah pengaruh proses pembelajaran melalui pendidikan dan latihan serta magang terhadap faktor psikologis yang meliputi sikap dan motivasi kewirausahaan serta implikasinya pada perilaku kewirausahaan mahasiswa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas, dapat dikemukakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh proses pembelajaran, sikap dan motivasinya. Kaitannya dengan kewirausahaan, apakah perilaku kewirausahaan dipengaruhi oleh proses pembelajaran (pendidikan dan latihan serta Magang), faktor psikologikal (sikap dan motivasi) kewirausahaan? Hal ini menarik untuk dikaji.

Adapun permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Se jauh mana pengaruh Pendidikan dan Latihan serta Magang terhadap Sikap Kewirausahaan peserta Program Mahasiswa Wirausaha
- 2) Se jauh mana pengaruh Pendidikan dan Latihan, Magang, dan Sikap Kewirausahaan terhadap Motivasi Kewirausahaan peserta Program Mahasiswa Wirausaha
- 3) Se jauh mana pengaruh Pendidikan dan Latihan, Magang, Sikap, dan Motivasi Kewirausahaan terhadap perilaku kewirausahaan peserta Program Mahasiswa Wirausaha

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menggali, menganalisis dan mengetahui secara lebih mendalam tentang Pengaruh Pendidikan dan Latihan, Magang Kewirausahaan, terhadap Sikap dan Motivasi Kewirausahaan serta implikasinya pada Perilaku Kewirausahaan.

Dari tujuan bersifat umum kemudian dijabarkan dalam bentuk rumusan tujuan-tujuan yang secara khusus yang operasional sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Pendidikan dan Latihan serta Magang terhadap Sikap Kewirausahaan peserta Program Mahasiswa Wirausaha
- 2) Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Pendidikan dan Latihan, Magang, dan Sikap Kewirausahaan terhadap Motivasi Kewirausahaan peserta Program Mahasiswa Wirausaha
- 3) Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Pendidikan dan Latihan, Magang, Sikap, dan Motivasi Kewirausahaan terhadap Perilaku Kewirausahaan peserta Program Mahasiswa Wirausaha

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi, baik secara teoretis maupun secara praktis, sebagai berikut:

- 1) Kegunaan Teoretis
 - (1) Memperluas wawasan dan khasanah keilmuan dalam bidang pendidikan khususnya bidang pendidikan bisnis/kewirausahaan dalam upaya membentuk warga negara yang memiliki sikap, motivasi dan perilaku kewirausahaan sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan
 - (2) Memberikan gambaran yang luas dan komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sikap, motivasi dan perilaku kewirausahaan
 - (3) Memberikan sumbangan bagi pengembangan pendidikan bisnis/kewirausahaan.

- (4) Menambah khasanah dalam mengkaji teori-teori ilmu ekonomi, khususnya tentang kewirausahaan dan psikologi pendidikan.

2) Kegunaan Praktis

- (1) Memberikan gambaran empirik tentang, pelaksanaan pendidikan dan latihan, magang, sikap dan motivasi kewirausahaan serta perilaku kewirausahaan
- (2) Sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan/pemerintah/sekolah dalam upaya membentuk dan mengembangkan sikap dan motivasi sekaligus membentuk perilaku kewirausahaan mahasiswa yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat pengangguran terdidik
- (3) Sebagai umpan balik bagi pengembangan kurikulum IPS/ekonomi dan bisnis untuk mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan pada jenis dan jenjang pendidikan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan hidup (*life skills*) dalam tantangan jaman yang kompetitif.

